



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/207/KPTS/03/2025**

TENTANG

**PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor B/66/KPTS/03/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan kebutuhan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Bupati maka Keputusan Bupati Nomor B/66/KPTS/03/2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

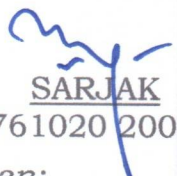
- KESATU** : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat dilakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B/66/KPTS/03/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : B/207/KPTS/03/2025
 TANGGAL: 22 April 2025

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Judul Rancangan Peraturan Bupati	Perangkat Daerah Pemrakarsa
1	Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo
2	Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	
3	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
4	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
5	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Liwa	Dinas PU&PR
6	Rencana Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Rencana Kontijensi	
8	Kajian Resiko Bencana	
9	Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan	Dinas Perhubungan
10	Jalan Umum sebagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
11	Rencana Induk Geopark Kaldera Suoh	Balitbang
12	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dibidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
14	Pedoman Cadangan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Bencana	Dinas Ketahanan Pangan
15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
16	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Nutrisi Lansia	Dinas Sosial
17	Pusat kejahteraan sosial dan sistim layanan rujukan terpadu	
18	Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial	
19	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi BLUD	RSUD Alimuddin Umar
20	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar	
21	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Palayanan Pasar	Dinas Koperasi Ukm
22	Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	
23	Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro	
24	Penyelenggaraan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	
25	Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah	

26	Pedoman Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di Pemerintah Daerah Tahun Pelajaran 2025-2026	Dinas Pendidikan
27	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata pada Satuan Pendidikan Kesetaraan	
28	Beasiswa Pendidikan Seni	
29	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata	
30	Beasiswa Pendidikan Bahasa Lampung	
31	Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui dukungan Program Sekolah Penggerak	
32	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
33	Penugasan guru sebagai Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP di Lingkungan Pemerintah Daerah	
34	Daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN Pada Satuan Pendidikan Negeri	BKAD
35	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026	
36	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	
37	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	
38	Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	
39	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas	
40	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Transaksi Non Tunai	
41	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	
42	Properti Investasi	
43	Pedoman Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	
44	Analisis Standar Belanja Fisik dan Non Fisik Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah	
45	Standar Sarana dan Prasarana Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah	
46	Kebijakan Akuntansi	
47	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	
48	Wajib Pungut Pajak Daerah	
49	Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah	Bapenda
50	Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah	
51	Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
52	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Opsen Mineral Bukan Logam Dan Batuan	
53	Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Pekon	
54	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
55	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	
56	Penetapan Rencana Strategis 2025-2029	
57	Penetapan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah Tahun 2026	Dinas KBPP dan PA
58	Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak	
59	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tubekulacasi	Dinas Kesehatan
60	Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Masuk Seminung Lumbok Resort	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

61	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	Dinas Perkebunan
62	Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Secara Elektronik	
63	Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKP SDM
64	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah	
65	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	
66	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat	
67	Lembaga Himpun Pemekonan	Dinas PMP
68	Perangkat Pekon	
69	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025	
70	Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2025	
71	Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon Kepada Setiap Pekon Tahun Anggaran 2025	
72	Pedoman Pendirian Pengurusan Pengelolaan dan Pemberhentian Badan Usaha Milik Desa	
73	Peratin	
74	Pemilihan Peratin	
75	Pedoman Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Dalam Pembangunan Pekon	
76	Tata Cara Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pelaksanaan APB Pekon	
77	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit	
78	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pada Cahya Kecamatan Balik Bukit	
79	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebarus Kecamatan Balik Bukit	
80	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit	
81	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wates Kecamatan Balik Bukit	
82	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit	
83	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit	
84	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit	
85	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bahwai Kecamatan Balik Bukit	
86	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit	
87	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit	
88	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit	
89	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suoh	
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
91	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sri Mulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh	

92	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
93	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Sari Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
94	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
95	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tri Mekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
96	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
97	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ringin Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
98	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
99	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Negeri Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
100	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Marga Kecamatan Suoh	
101	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Agung Kecamatan Suoh	
102	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh	
103	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Banding Agung Kecamatan Suoh	
104	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ringin Sari Kecamatan Suoh	
105	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rowo Rejo Kecamatan Suoh	
106	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sido Rejo Kecamatan Suoh	
107	Pedoman Audit Kinerja Pada Perangkat Daerah Tahun 2024	
108	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Inspektorat
109	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	
110	Kode Klasifikasi Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah	
111	Arsip terjaga dan ahli media	
112	Arsip vital	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
113	Penyusutan Arsip Dinamis dan Statis Serta Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Milik Daerah	
114	Aplikasi Inlislite	
115	Pedoman Pelaksanaan Kabupaten Literasi	
116	Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan	
117	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah	
118	Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi
119	Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah	
120	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan	

121	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri	Bagian Perekonomian
122	Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Pesagi Mandiri Perseroan Dalam Rangka Pengelolaan Pasar Tematik Dan Kawasan Wisata Lumbok Seminung	
123	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD
124	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra
125	Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian Tata Pemerintahan
126	Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Umum

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS